

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Ahmad Sudrajat, 2022, *Memahami Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, Badan Kepegawaian Negara.
- Aminuddin Umar, 2018, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- As Homby, 1985, "*Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*", Oxford University Press, New York, hlm. 720, 768. Dalam, I Made Pasek Dinatha, 2016, *Metedologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Haeli dan Widyaiswara, 2018, *Manajemen Aparatur Sipil Negara, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Diklat Prajabatan CPNSD*, Nusa Tenggara Barat.
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Moh. Mahfud, 1998. *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,
- Nur Basuki Winanmo, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda Media, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2014, *Wewenang*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Ridwan HR, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rosdakarya Musanef, 2006, *Administrasi Kepegawaian*, Rajawi, Jakarta.
- Siswanto Sastrahadiwiryo, 2002, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, Rinneka Cipta Jakarta,
- Soekarno, 1983, *Himpunan Soal-Jawab Kepegawaian Negeri Sipil*, Penerbit Miswar, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, 2008, *Hukum Kepegawaian di Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika.

Utrecht, 1992, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Penerbit Bachtiar, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendahaaraan Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan Barang Milik Negara

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Walikota Padang Panjang Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penegakan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kota Padang Panjang

Peraturan Pemerintah Walikota Kota Padang Panjang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penjelasan Tambahan bagi Pegawai Negeri Sipil yang Diberhentikan Sementara dan Pengkatifan Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil

Keputusan Walikota Nomor 800.1.6.5.258/PS-PP/BKPSDM-PP/III/2023 tentang Pemberhentian Sementara sebagai PNS yang Ditahan Menjadi Tersangka Tindak Pidana

### C. JURNAL DAN KAYA ILMIAH

Agustian Yusuf, 2015, *Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik*, e-Jurnal Katalogis, Vol. 03, No. 11.

Dwi Heri Sudaryanto, 2014, *Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)*, Jurnal Media Neliti Hukum, Vol. 04, No. 3

Enny Agustina, 2019, *Prinsip Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Menuju Good Governance*, Solusi, Vol. 19, No.1.

Ivan Fauzani Raharja, 2014, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*, Inovatif, Vol. 7, No, 2.

Kartika Amiri, 2015, *Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Secara Akuntabel Menuju Good Governance*, Potret Pemikiran, Vol. 2, No, 2.

Lidia M. Mawikere, Peter Marshall Kapojos, dan Johan Neyland, 2022, *Analisis Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kota Tomohon*, Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 17, No. 2.

Maindoka dkk., 2021, *Implementasi Kebijakan Program Tenaga Harian Lepas di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado*, Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Vol. 1, No. 2.

Nunung Runiawati, 2017, *Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Suatu Pendekatan Teoritis dan Praktis dalam Menentukan Metode Pemanfaatan Aset)*, Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, Vol. 1, No. 1.

Regurius Roberto Loi dan Gamosokhi Buulolo, 2021, *Peranan Aparatur Sipil Negara dalam Meningkatkan Pelayanan Publik*, Journal Governance Opinion, Vol. 6, No. 2.

Siti Zikrina Farahdiba dkk, 2021, *Tinjauan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 5, No. 2.

Sri Nur Hari Susanto, 2019, *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi*, Administrative Law & Governance Journal, Vol 02. No. 01.

Syatriawan Perdana Putra dkk, 2016, *Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Puskesmas se-Kabupaten Dompu*, JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala, Vol. 1, No. 1.

Tasya Alvira, 2022, *Penegakan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Melanggar Ketentuan Jam Kerja Pada Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang*, Skripsi Sarjana Universitas Andalas, Padang.

Teguh Dinata Saputra, 2023, *Efektivitas Penerapan Sistem Merit dalam Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah (Studi Kasus Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia)*, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 8, No. 3.

Yonnawati, 2022, *Penegakan hukum sanksi administrasi terhadap pelanggaran perizinan*, Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol. 3, No. 1.

#### D. INTERNET

Amnesty Internasional, *Ontleend aan de Encyclopedie van de Mensenrechten*, <https://www.ensie.nl/amnesty-international/sancties>, diakses pada tanggal 25 Januari 2024 Pukul 00.50.

Jeka Kampai, *Mobil Dinas Kasatpol PP Padang Panjang Sengaja Dirusak untuk Klaim Asuransi*, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6579008/mobil-dinas-kasatpol-pp-padang-panjang-sengaja-dirusak-untuk-klaim-asuransi>, diakses pada 6 Februari 2024 Pukul 08.17 WIB

Muhammad Rizki, *Walikota Padang Panjang Minta Maaf Soal Gaduh Mobil Dinas Dirusak Demi Asuransi*, <https://kumparan.com/kumparannews/walikota-padang-panjang-minta-maaf-soal-gaduh-mobil-dinas-dirusak-demi-asuransi-1zs4H6fg2UA>, diakses pada tanggal 6 April 2023 Pukul 10.55 WIB.

Rifnaldi, *Walikota Bentuk Tim Investigasi Kasatpol PP dan Damkar Akan Dinonaktifkan*, <https://www.goparlement.com/2023/02/walikota-bentuk-tim-ivestigasi-kasatpol.html>, diakses pada Tanggal 6 April 2024 Pukul 10.46

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jambi, *Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah*, [https://jambi.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/03/TULISAN-HUKUM\\_Perangkat-Daerah\\_final.pdf](https://jambi.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/03/TULISAN-HUKUM_Perangkat-Daerah_final.pdf), diakses pada Tanggal 9 Mei 2024 Pukul 14.11 WIB.

Zaki Hajral, *Polisi tetapkan 3 tersangka dalam kasus pengrusakan mobil dinas Satpol PP Padang Panjang yang sempat viral beberapa waktu lalu*, <https://salingkamedia.com/tersangka-dalam-kasus-pengrusakan-mobil-dinas-satpol-pp-padang-panjang/>, diakses pada tanggal 6 April 2023 Pukul 10.48.

#### **A. WAWANCARA**

Assesor SDM Aparatur Ahli Muda Sub Koordonator Kinerja dan Disiplin Bapak Dinul Akhyar, S.H., BKPSDM Kota Padang Panjang, Selasa, 2 April 2024 Pukul 08.35 WIB.

Staff Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Bapak Drs. Maiharman, Dinas Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, Jum'at, 5 April 2024 Pukul 16.14 WIB.

